

## ABSTRAK

Bahijah (0820612046), Analisa Yuridis Wanprestasi Terhadap Perjanjian Pencarteran Angkutan Laut (Studi Kasus Putusan No.153/Pdt/G/2009/ PN.JKT.UT). Dibawah bimbingan Suherman, SH., LLM.

Pengangkutan mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia terutama peningkatan ekonomi rakyat yang mendukung laju Pertumbuhan dan Perkembangan suatu daerah. Namun dalam pelaksanaannya sering terjadi permasalahan antara pencarter dan pemilik kapal dikarenakan kehilangan, rusak serta keterlambatan barang sampai ditujuan yang akhirnya menimbulkan masalah yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Para Pihak dalam perjanjian Pencarteran angkutan laut. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah tanggungjawab masing-masing para pihak dalam perjanjian pencarteran angkutan laut, Bagaimanakah penyelesaian sengketa akibat terjadinya wanprestasi terhadap perjanjian pencarteran angkutan laut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif sedangkan data yang digunakan data primer dan sekunder serta data tersier. Permasalahan Pengangkutan Barang Melalui Laut dengan Kapal Laut timbul karena pengangkut tidak melaksanakan prestasi yang dibebankan kepadanya. Keadaan memaksa dan kelalaian merupakan penyebab Pengangkut tidak dapat melaksanakan prestasinya. Risiko karena keadaan memaksa maka pengangkut dibebaskan dari tanggung jawabnya. Sedangkan risiko karena kelalaian merupakan tanggung jawab pengangkut. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa perusahaan transport seharusnya tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dari segi waktu sampainya barang ketempat tujuan sejauh hal itu bukan merupakan kelalaian dari pengangkut. Bilamana sipengangkut dapat membuktikan keterlambatan pengiriman merupakan suatu kelalaian tetapi lebih bersifat kepada *force majeure* maka pengangkut dapat terlepas dari klaim yang diajukan. Jadi penggantian kerugian sifatnya relatif. Dalam menjalankan kewajibannya tidak tertutup kemungkinan bahwa pengangkut akan menemui suatu keadaan yang dapat menghambat, memperlambat dalam melaksanakan kewajibannya. Faktor penghambat tersebut bisa berasal dari kurangnya fasilitas dari pelabuhan hingga adanya itikad tidak baik dari pemilik barang dengan mengurangi jumlah, berat dari muatan yang diangkut.

Kata Kunci : wanprestasi, perjanjian carter, pengangkutan barang

## **ABSTRACT**

Bahijah (0820612046), Juridical Analysis of Default Against Chartering Marine Transport Agreement (Case Study Verdict No.153/Pdt/G/2009/ PN.JKT.UT). Under Supervisor of Suherman, SH., LLM

Transportation plays an important role in human life, especially the people who support the increase in the rate of economic growth and development of an area. However the common problems in implementation between the charterer and ship owners due to loss, damage and delay to the goods that are geared toward finally raises issues relating to Responsibilities of the Parties in ocean freight chartering agreement. As for the problem of this research is the responsibility of each How the parties to the agreement chartering of ocean freight, How is the settlement of disputes due to a default of the agreement chartering of ocean freight. The research method used is the juridical normative data used while the primary and secondary data as well as data tertiary. Goods Transportation Problems Through the Naval Sea arises because the carrier does not implement achievement levied. Circumstances force and negligence is a cause of the Carrier fails to execute his performance. Risk because circumstances forced the carrier exempt from responsibility. While the risk of negligence is the responsibility of the carrier. From the results of the study concluded that the transport company should not be responsible for delays in the arrival of the goods in terms of time as far as it is the place of destination is not the negligence of the carrier. When the carrier can prove a negligent delay in delivery but more are to force majeure the carrier can be separated from the claims filed. So the relative nature of restitution. In performing duties it was likely that the carrier will see a state that can inhibit, slow to perform its obligations. Inhibiting factors can be derived from the lack of port facilities to the bad faith of the owner of the goods by reducing the number, the weight of the cargo being transported.

Keywords: Breach of contract, charter agreement, transport of goods